

LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Lembar Evaluasi SUP
3. Surat Permohonan Izin
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Frekuensi Bimbingan

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Manuskrip Wawancara
3. Matriks Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. PEMAHAMAN MENGENAI SAP

1. Bagaimana pemahaman dan persepsi anda terhadap laporan keuangan dengan konsep akrual.
2. Kesiapan apa saja yang dilakukan DPKAD dalam menghadapi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Basis Akrual.
3. Kesiapan DPKAD dalam penerapan SAP ini.
4. Kesiapan Pemda dalam penerapan SAP ini.
5. Kekurangan dalam penerapan SAP PP No. 71 ini.
6. Kelebihan apa yang ada di SAP PP No. 71 ini.

B. KOMUNIKASI

TRANSMISI:

1. Apakah sering mengadakan rapat dengan pimpinan mengenai SAP basis akrual.

KEJELASAN:

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan atau dihadiri oleh DPKAD.
2. Apa tujuan pemerintah menerapkan SAP basis akrual.

KONSISTENSI:

1. Tujuan SAP dari sudut pandang DPKAD.
2. Hubungannya penerapan SAP dengan opini yang diberikan oleh BPK.

C. SUMBER DAYA

STAF:

1. Lembaga yang dijadikan sebagai ahli bagi DPKAD apabila dalam penerapan SAP membutuhkan bantuan dari seseorang yang ahli di bidangnya.
2. Alokasi SDM yang khusus dipersiapkan untuk menangani pelaporan berbasis akrual.
3. Pelatihan/diklat yang dilakukan oleh bidang akuntansi mengenai pelaporan basis akrual.
4. Apakah kompetensi yang dimiliki oleh SDM bidang akuntansi dalam menunjang penerapan basis akrual sudah cukup.

INFORMASI:

1. Bagaimana pemahaman dan persepsi anda terhadap laporan keuangan dengan konsep akrual.
2. Kekurangan dalam penerapan SAP PP No. 71 ini.
3. Kelebihan apa yang ada di SAP PP No. 71 ini.
4. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan SAP basis akrual.
5. Pendapat anda mengenai LKPD Kota Bandung yang mendapatkan opini WDP dari BPK.

WEWENANG:

Frlia Dera Waliah, 2015

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

1. Kesiapan apa saja yang dilakukan DPKAD dalam menghadapi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Basis AkruaI.
2. Mampukah Kota Bandung menerapkan SAP basis akruaI ini di tahun 2015.

FASILITAS:

1. Apakah ada software yang membantu dalam pembuatan laporan keuangan basis akruaI.
2. Bagaimana penggunaan software tersebut.
3. Sarana apa saja yang disediakan? Apakah sudah efektif dan efisien.
4. Prasarana apa yang disediakan? Apakah sudah efektif dan efisien.

D. DISPOSISI

PENGANGKATAN BIROKRASI:

1. Bagaimana DPKAD dalam menghadapi kesulitan dalam menerapkan SAP basis akruaI.

INSENTIF:

1. Secara pribadi, respon sebagai individual terhadap keputusan pemerintah mengenai kewajiban dalam menerapkan SAP basis akruaI ini.
2. Apakah ada tambahan insentif apabila sebuah LKPD mendapatkan opini WTP dari BPK.

E. STRUKTUR BIROKRASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR:

1. Secara organisasinya, apakah SAP ini harus dilaksanakan.
2. Bagaimana strategi Pemda dalam penerapan SAP basis akruaI.

FRAGMENTASI:

1. Komitmen dari pimpinan, apakah didukung dengan baik semenjak dari awal peraturan ini dibuat.
2. Bagaimana kesiapan DPKAD dalam penerapan SAP basis akruaI.
3. Kesiapan Pemda dalam penerapan SAP basis akruaI